

ABSTRAK

Yazid Hufron 1150030068: *Analisis Kebijakan Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dihubungkan Dengan Permensos Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Atensi Rehabilitasi Sosial Perspektif Siyasah Dusturiyah.*

Rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam penanganan penyalahgunaan penggunaan narkotika di Indonesia. Dengan adanya kebijakan mengenai atensi rehabilitasi sosial BNNP Jawa Barat meresponnya dengan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan tujuan pemulihan serta tidak adanya pengucilan dan diskriminalisasi terhadap penyalahguna. Adanya kegiatan IBM ini dapat menjadi bumerang jika tidak dilaksanakan secara serius karena rehabilitasi sosial terindikasi menyebabkan tidak adanya efek jera bagi para penyalahguna dan dapat menyebabkan kemudharatan yang baru karena penentuan korban dalam penyalahgunaan narkotika sukar dilakukan. Jika mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tentang Narkotika penyalahguna itu merupakan tindakan kriminal dan harus di pidana penjara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses rehabilitasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah khususnya dalam undang-undang narkotika serta kebijakan atensi rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika baik secara hukum positif maupun secara syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas, yaitu: teori negara hukum, teori siyasah dusturiyah, teori kebijakan publik, teori rehabilitasi sosial, dan teori penyalahgunaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada undang-undang serta gejala sosial yang ada dalam masyarakat. kemudian pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan temuan yang didapatkan dan mengkomparasikan dengan teori yang ada.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, implementasi Kebijakan Undang-Undang 16 Tahun 2020 Tentang Atensi Rehabilitasi Sosial di BNN Jawa Barat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dengan Program Pemberdayaan Alternatif, Program Pencegahan dengan Program Ketahanan Keluarga. Kedua, BNNP Jawa Barat melakukan berbagai kebijakan perlindungan rehabilitasi sosial diantaranya bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dengan menggunakan kegiatan IBM sebagai proses perlindungan terhadap korban penyalahguna narkotika. Ketiga, Dalam tinjauan siyasah Dusturiyah perlu adanya pengawasan yang berbasis syariah dalam kegiatan IBM BNN Jawa Barat khususnya bagi masyarakat muslim serta perlu adanya ketegasan terhadap penentuan status korban dalam penyalahguna narkotika dalam upaya menghilangkan serta mencegah adanya kemudharatan yang baru.

Kata Kunci : Narkotika; Rehabilitasi Sosial; Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

Yazid Hufron 11530300068: *Analysis of Social Rehabilitation Policy for Narcotics Abusers at the National Narcotics Agency of West Java Province in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Linked to the Minister of Social Affairs Number 16 of 2020 concerning Attention to Social Rehabilitation from the Perspective of Siyasahtuturiyah.*

Social rehabilitation is one form of policy in handling narcotics abuse in Indonesia. With the policy regarding social rehabilitation attention, the West Java BNNP responded with Community Based Intervention (IBM) with the aim of recovery and the absence of exclusion and discrimination against abusers. The existence of this IBM activity can backfire if it is not carried out seriously because social rehabilitation is indicated to cause no deterrent effect for abusers and can cause new harm because determining victims in narcotics abuse is difficult. If referring to article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law no. 35 Regarding Narcotics abuse is a criminal act and must be sentenced to prison.

This study aims to identify and analyze the rehabilitation process in accordance with government policies, especially in the narcotics law and social rehabilitation attention policy for narcotics abusers, both legally positive and according to Islamic law.

This study uses several theories that are considered relevant in analyzing the problems discussed, namely: the rule of law theory, the theory of siyasahtuturiyah, the theory of public policy, the theory of social rehabilitation, and the theory of abuse.

This study uses empirical juridical methods, namely research that emphasizes laws and social phenomena that exist in society. Then a descriptive analysis approach is used to describe the findings obtained and compare them with existing theories.

The results of the study show that: First, the implementation of Law 16 of 2020 Policy concerning Social Rehabilitation Attention at BNN West Java is carried out with various activities carried out through the Prevention and Community Empowerment (P2M) Sector with Alternative Empowerment Programs, Prevention Programs with Family Resilience Programs. Second, the West Java BNNP has implemented various social rehabilitation protection policies, including collaborating with several related agencies by using IBM's activities as a protection process for victims of narcotics abusers. Third, in the review of the Duturiyah siyasahtuturiyah, there is a need for sharia-based supervision in the activities of the West Java BNN, especially for the Muslim community and there is a need for firmness in determining the status of victims in narcotics abusers in an effort to eliminate and prevent new harm.

Keywords: Narcotics; Social Rehabilitation; Siyasahtuturiyah